

**PENDIDIKAN ISLAM MASA KOLONIAL BELANDA:
Studi Komparatif Pendidikan Islam dan Pendidikan Kolonial Di Jawa
Awal Abad XX**

Ahmad Sodikin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo
Email: ahmadsodikin@iainponorogo.ac.id

Abstract: *Islamic and Colonial Education are two methods of educating Indonesian people, especially in Java. Islamic education and colonial education have their advantages for the community. Islamic education tended to be more religious, while Colonial education led to secular and liberal. Each education has a different teaching system because it has different goals and targets according to the interests of the government in power at that time. The method in this writing is the historical method, which relies on four things generally: heuristics, criticism, verification, and historiography. Because this is a political history, the author uses a socio-political approach to analyze it. Meanwhile, it was helped by the challenge and response theory developed by Arnold Toynbee. According to this theory, culture occurs (born) because of challenges and answers (challenge and response) between humans and the surrounding environment. The results of this study show that the education of the Dutch colonial government was racial and discriminatory. Thus emerged a form of resistance in the field of education, so Islamic boarding schools and private schools (particles) were born such as: Pondok Pesantren Tebu Ireng (1899 AD), Pondok Pesantren Tambak Beras (1919 AD) East Java, Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta (1911), Pondok Pesantren Sukamanah, Cipasang (1930) Tasik Malaya, West Java. At the same time, private schools (particles) are Muhammadiyah School (1912), Taman Siswa (1922), and Nahdlatul Ulama (1926).*

Keywords: *Islamic Education; Colonial Education; Java Early XX Century*

Abstrak: Pendidikan Islam dan Pendidikan Kolonial merupakan dua metode untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa. Pendidikan Islam maupun pendidikan Kolonial mempunyai keunggulan tersendiri bagi masyarakat. Pendidikan Islam cenderung lebih religius, sedangkan pendidikan Kolonial mengarah pada sekuler, dan liberal. Setiap pendidikan memiliki sistem pengajaran yang berbeda karena mempunyai tujuan dan target yang berbeda sesuai kepentingan pemerintah yang berkuasa saat itu. Metode dalam penulisan ini adalah menggunakan metode sejarah yang bertumpu pada empat hal sebagaimana umumnya yaitu: heuristik, kritik, verifikasi dan historiografi. Karena ini merupakan sejarah politik, maka untuk menganalisisnya penulis menggunakan pendekatan sosiologi-politik. Sementara itu dibantu dengan teori challenge and response yang dikembangkan oleh Arnold Toynbe. Menurut teori ini kebudayaan terjadi (lahir) karena adanya tantangan dan jawaban (*challenge and response*) antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pendidikan pemerintah kolonial Belanda yang rasial dan diskriminatif. Dengan demikian muncul bentuk perlawanan dalam bidang pendidikan, maka lahirlah pondok-pondok

pesantren dan sekolah-sekolah swasta (partikelir) seperti: Pondok Pesantren Tebu Ireng (1899 M), Pondok Pesantren Tambak Beras (1919 M) Jawa Timur, Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta (1911), Pondok Pesantren Sukamanah, Cipasung (1930) Tasik Malaya, Jawa Barat. Sedangkan Sekolah-sekolah swasta (partikelir) yaitu Sekolah Muhammadiyah (1912), Taman Siswa (1922) dan Nahdlatul Ulama (1926).

Kata Kunci : *Pendidikan Islam; Pendidikan Kolonial; Jawa awal abad XX.*

PENDAHULUAN

Masalah sejarah pendidikan adalah alat untuk dapat mengerti seberapa jauh dan dalamnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh suatu bangsa. Oleh karena itu, sejarah pendidikan adalah suatu hal yang berharga. Pendidikan yang dimaksud adalah upaya mencerdaskan pikiran, menghaluskan budi pekerti, dan memperluas pengetahuan. Namun pendidikan itu menjadi suatu sistem yang digunakan oleh penguasa untuk mewujudkan keinginannya dan mengendalikan kelompok yang dikuasai. Itulah yang terjadi di Indonesia pada abad ke XIX saat dikuasai oleh Kolonial Belanda. Mereka membuat sistem pendidikan, dasar dan tujuan pendidikan, serta pelaksanaannya sesuai seleranya.

Lembaga Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan sarana pengembangan para generasi muda Islam disatu pihak, dan sarana dakwah Islam dipihak lain. Ada beberapa faktor munculnya pendidikan Islam. Pertama, sebelum munculnya Islam di Indonesia sudah ada agama Hindu-Budha yang menjadi agama mayoritas masyarakat. Kedua, para misionaris mengajarkan agamanya pada masyarakat lewat pendidikan dan umum. Dalam hal ini penulis mencoba melihatnya dari perspektif sejarah politik karena didalamnya terdapat struktur kekuasaan, tipe elite, kategori otoritas, kebudayaan politik, kepemimpinan, proses mobilisasi, dan lain sebagainya.

Struktur kekuasaan dan tipe elite ini sangat nampak dalam masalah pendidikan yang dijalankan oleh Kolonial Belanda terhadap pribumi. Struktur kekuasaan yang dimaksud adalah warga yang dijajah dan penguasa yang menjajah (menguasai). Sedangkan tipe elite ini terdapat pada golongan bangsa Eropa, Cina, dan Peranakan (Indo-Eropa). Akan tetapi masyarakat pribumi menjadi golongan warga kelas tiga dalam struktur sosial masyarakat, khususnya dalam pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Hindia-Belanda.

Adanya diskriminasi dalam berbagai perlakuan, maka dikemudian hari menjadi konflik yang menguat antara elite pribumi (cendekiawan) dengan pemerintah Hindia-Belanda. Hal ini menyebabkan perlawanan dalam pemikiran (gagasan, ide) yaitu dengan membuat pergerakan-pergerakan di tiap-tiap daerah hingga bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Untuk membahas permasalahan tersebut agar tidak melebar (fokus) pada Sistem Pendidikan Islam Masa Kolonial Belanda Abad XIX, maka perlu dibuat rumusan masalah sebagai berikut. Rumusan Masalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan antara lain: Bagaimana sistem pendidikan Islam di Jawa abad ke-XIX, dan Mengapa muncul sistem pendidikan Islam di Jawa akhir abad XIX awal abad XX.

Berangkat dari kesadaran pengalaman yang terjadi di masyarakat Jawa khususnya, lahirlah organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini dipelopori

oleh Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mempunyai tujuan antara lain. *Pertama*, memajukan pengajaran. *Kedua*, memajukan pertanian, peternakan dan perdagangan. *Ketiga*, memajukan tehnik dan industri. *Keempat*, menghidupkan kembali kebudayaan¹.

METODE PENELITIAN

Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah menurut Kuntowijoyo ada empat hal yang harus dipenuhi yaitu: heriustik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi². Pertama, heuristik merupakan tahapan untuk mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti mencari sumber-sumber untuk menggali informasi terkait masalah penelitian. Sumber utama dari penelitian ini adalah buku-buku yang terkait masalah pendidikan dimasa pemerintah kolonial Belanda maupun pendidikan Islam di Jawa pada akhir abad ke XIX hingga awal abad XX. Sedangkan, sumber pendukung antara lain jurnal-jurnal yang telah ditelusuri dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian ini.

Kedua, verifikasi atau kritik merupakan tahap pengujian terhadap sumber-sumber yang didapat untuk menentukan keaslian sumber, turunan serta relevan tidaknya suatu sumber. Kritik dilakukan untuk dengan tujuan untuk menyeleksi data menjadi fakta. Pada tahap kritik dibagi menjadi dua bentuk yaitu kritik intern dan kritik ekstern³. Kritik intern dilakukan dengan cara pengujian terhadap isi bacaan dari suatu sumber yang kita dapatkan. Sementara itu kritik ekstern dilakukan dengan cara pengujian terhadap bagian luar dari sumber yang kita peroleh. Kemudian dilakukan pengkategorian terhadap sumber-sumber yang dibutuhkan dan yang tidak diperlukan dalam proses penelitian. Peneliti hanya melakukan kritik intern yakni dengan menelaah atau menguji isi konten dari sumber yang didapat.

Ketiga, interpretasi atau penafsiran merupakan tahap penafsiran atau analisis dari data-data untuk mendapatkan fakta-fakta. Selanjutnya peneliti mengkaitkan ide antara fakta yang satu dengan fakta yang lain untuk disatukan dan disintesiskan sehingga membentuk cerita sejarah yang utuh⁴. Terakhir, historiografi merupakan tahap akhir dari metode penelitian yaitu berupa penulisan peristiwa sejarah berdasarkan hasil penelitian. Bentuk penulisan sejarah haruslah secara logis, kronologis dan sistematis.

Pendekatan yang digunakan dalam mengalisis tulisan ini adalah sosial-politik karena yang akan dibahas adalah kelompok masyarakat yang berinteraksi sama dengan yang lainnya disuatu wilayah atau tempat dalam hal ini Indonesia. Sedangkan pendekatan politik digunakan untuk melihat kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial terhadap

¹ Siswondo, S.P., dkk. *Sejarah Daerah Jawa Timur*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia daerah, 1978), hal. 144.

² Basri MS, *Metodologi Penelitian Sejarah: Pendekatan, Teori dan Praktik* (Jakarta: Restu Agung, 2006), hlm. 34.

³ Sugeng Priyadi, *Dasar-Dasar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 118-119.

⁴ M. Dien Madjid & Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 225.

pendidikan bumi putera. Menurut Singh ada empat perspektif atau pendekatan di dalam memahami terjadinya gerakan-gerakan sosial. *Pertama*, Aliran yang menganalisis gerakan sosial dari sudut proses politik, proses politik dan struktur mobilisasi. *Kedua*, Aliran yang menganalisis gerakan sosial dari perspektif mobilisasi sumberdaya, proses framing. *Ketiga*, Aliran yang menganalisis gerakan sosial dari sudut perilaku kolektif. *Keempat*, Aliran gerakan sosial baru aliran berbasis di Eropa Barat⁵.

Teori yang digunakan oleh penulis adalah *Challenge and response* menurut Arnold Toybe. Teori ini pada dasarnya menjelaskan bahwa ketika adanya tantangan dari kondisi atau kelompok tertentu. Sebagai akibat dari tantangan kondisi atau kelompok itu, maka akan mendatangkan respon atau jawaban atas tantangan tersebut. Pada kasus ini adalah adanya pendidikan yang diberikan oleh Kolonial kepada masyarakat bumi putera sebagai respon dari politik etis. Akan tetapi pendidikan tersebut masih sangat diskriminatif, dan tidak mengajarkan mata pelajaran agama Islam. Pada sisi yang lain kaum kolonial Belanda mengajarkan mata pelajaran agama Kristen kepada semua murid-muridnya termasuk bumi putera. Oleh karena itu masyarakat Indonesia yang beragama Islam yang dimotori oleh para ulama, kyai dan tokoh masyarakat membuat pendidikan sendiri yang berlandaskan ajaran dan nilai-nilai Islam dapat juga disebut sistem pendidikan Islam. Inilah respon atau jawaban yang diberikan oleh masyarakat bumi putera kepada pemerintah kolonial Belanda dengan adanya pendidikan kolonial. Dari sinilah kemudian muncul madrasah-madrasah, pondok pesantren, dan sekolah Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Islam

Sejak pengajaran diperkenalkan, diskriminasi rasial maupun lapisan telah diperlihatkan. Sekolah kelas dua dan sekolah kelas satu diperuntukan bagi pribumi. Sekolah kelas dua diperuntukan lapisan bawah, sekolah kelas satu untuk golongan menengah. Untuk anak-anak eropa didirikan sekolah khusus yakni ESL (*Europese Lagere School*). Pada awal abad ke XI sistem Sekolah Desa (*Volksschool*) diperkenalkan kepada masyarakat dengan lama pendidikan tiga tahun.⁶

Diciptakannya sekolah ini adalah untuk mengurangi beban biaya pemerintah kolonial dan menghilangkan anggapan adanya hubungan sekolah dengan maksud pengkristenan penduduk. Pembangunan dan penyelenggaraanya tergantung kepada kemampuan masyarakat setempat, pemerintah hanya memberi subsidi dan bimbingan. Mutu pelajarannya pun hanya cukup dapat membaca-menulis dan berhitung, tetapi murid yang terampil dan terpilih dapat melanjutkan pada sekolah sambungan (*Vervolgschool*), untuk masa dua tahun.⁷ Secara berangsur-angsur sistem ini menggantikan kedudukan sekolah kelas dua sebagai lembaga pendidikan terpenting bagi rakyat jelata.

⁵Mohammad Syawaludin, *Sosiologi Perlawanan; Stuid Perlawanan Repertoar Petani di Rengas Ogan Ilir Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2012), hal. 39-40.

⁶Nugroho Notosusanto, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia* 3, hal.18.

⁷*Ibid.*

Untuk merespon atas pendidikan yang diajarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Maka umat Islam yang pelopori oleh kyai, ulama, tokoh masyarakat (cendekiawan muslim) membuat sekolah-sekolah dan sistemnya sendiri. Hal ini dapat kita perhatikan dengan munculnya banyak pesantren pada abad ke XIX dan awal abad ke-XX bersamaan dengan banyaknya para generasi bangsa (cendekiawan muslim) yang kembali dari Timur-Tengah terutama Mekkah ke tanah air (Indonesia). Misalnya di Jawa lahir Pondok Pesantren Tebu Ireng (1899 M), Pondok Pesantren Tambak Beras (1919 M) Jawa Timur, Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta (1911), Pondok Pesantren Sukamanah, Cipasung (1930) Tasik Malaya, Jawa Barat dan lainnya.⁸

Disamping itu juga bermunculan pendidikan swasta (*partikulir*) sebagai buah dari kebijakan ordonansi sekolah oleh pemerintah kolonial Belanda. Lembaga-lembaga pendidikan swasta (*partikulir*) di Jawa abad ke XX saat itu antara lain: Muhammadiyah (1912) didirikan oleh K.H Achmad Dachlan di Yogyakarta. Pada tahun 1925 Muhammadiyah memiliki 29 Cabang sekolah dan tahun 1929 menjadi mempunyai 80 cabang sekolah⁹. Taman Siswa (1922) didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. Pendidikan Taman Siswa ini berdasar atas kebangsaan dan kebudayaan. Karena hal inilah Taman Siswa mempunyai banyak tokoh-tokoh nasionalis yang aktif terlibat didalamnya. Mereka membina dan mempertahankan keberadaan Lembaga pendidikan yang berwatak kebangsaan ini¹⁰. Nahdlatul Ulama (1926) didirikan oleh K.H Hasjim Asjari yang berpusat di Jombang, Jawa Timur. Lembaga ini tidak hanya berkegiatan dalam bidang sosial, tetapi juga mendirikan madrasah Salafiyah, bahkan terjun dalam bidang politik. Pada masa akhir pemerintah kolonial Belanda tahun 1942, Nahdlatul Ulama telah mempunyai 120 cabang diseluruh tanah air¹¹. Materi pendidikan madrasah ini adalah ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab dengan system sorogan dan bandongan.

Sejak awal abad ke-20, arah etis dijadikan sebagai landasan idiil dalam sistem pendidikan di Hindia-Belanda. Sejalan dengan pokok pikiran yang terkandung di dalamnya. Maka disusun juga dasar pemikiran yang bertumpu atas dua pokok pikiran utama. *Pertama*, pendidikan dan pengetahuan Barat di terapkan sebanyak mungkin bagi golongan bumi putra. *Kedua*, pemberian pendidikan rendah kepada golongan bumi putera disesuaikan dengan tenaga kerja murah. Hal ini memberi kesan adanya peluang bagi kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan pendidikan dari tujuan yang termuat dalam politik etis.¹² Para pelaksana pendidikan sendiri terkadang cenderung menerapkan kebijakan yang bertentangan dengan moral itu sendiri. Adanya penjenisan sekolah yang menerima murid berdasarkan latar belakang status sosialnya yang merupakan bagian dari penyimpangan itu sendiri.

⁸ Nurul Haq, *Sistem Pendidikan Islam Indonesia Awal Abad Ke-20*. Dalam Abdur Rahman Assegaf., dkk. Pendidikan Islam di Indonesia (Yogyakarta: Suka Press, 2007), hal. 89.

⁹ Nyoman Dekker, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Diawal Kebangkitan Nasional Pada Permulaan Abad XX*, (Malang: IKIP Malang, 1993), hal. 75.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hal-75-76.

¹² Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hal. 249.

Tujuan dari sistem pendidikan kolonial (barat) adalah berbeda dengan sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan barat selalu diarahkan sebagai instrumen vital untuk mendukung nilai-nilai dari barat yang cenderung sekuler. Sedangkan sistem pendidikan Islam sarat dengan nuansa religiusitas dan semangat spiritual¹³ dalam setiap materi yang diajarkan kepada para peserta didiknya. Menurut Husain Sulaiman Qurah sebagai dikutip oleh Abdurrahmansyah bahwa sekurang-kurangnya untuk mencapai tujuan pendidikan islam maka dalam kurikulumnya harus terdapat dua hal. Pertama, memiliki sikap yang peka terhadap situasi dan kondisi pendukung maupun penghambat, serta terhadap cara-cara mengatasi berbagai hambatan. Kedua, dapat diadakan perubahan-perubahan dalam mempermudah pelaksanaan dan pemilihan sarana untuk mencapai tujuan¹⁴. Tujuan dari pendidikan Islam adalah memberikan pelajaran agama diantaranya membaca dan menulis Al-Qur'an, mempelajari ushuluddin (pokok-pokok ajaran agama), ushul fiqh, fiqh, ilmu Bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu Sharaf dan sebagainya¹⁵.

Sebagai dampak dari pembaruan pendidikan di Jawa mengalami perubahan dalam berbagai aspek seperti, sistem, kelembagaan, administrasi, penyelenggara, maupun tamatan institusi pendidikan itu sendiri. Perubahan tersebut tampak memberi kesan, bahwa pembaruan pendidikan Islam di Jawa abad XX yang berorientasi pada modernisasi, menunjukkan dirinya sebagai bentuk respon terhadap sekolah-sekolah pemerintah Belanda yang netral agama¹⁶.

Kurikulum Pendidikan Islam senantiasa berhubungan erat dengan al-Qur'an sebagai petunjuk utama setiap seorang muslim. Karena al-Qur'an sebagai firman Tuhan merupakan aspek normatif dalam kurikulum tersebut yang diformat berdasarkan nilai-nilai transendental yang berfungsi sebagai konsep kependidikan sekaligus sebagai petunjuk hidup didunia dan akhirat. Sebagaimana pada umumnya bahwa kurikulum pendidikan disusun dan dikembangkan berdasarkan berbagai landasan diantaranya: landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis dan landasan organisatoris¹⁷.

Landasan filosofis merupakan dasar yang paling fundamental dari sebuah perancangan konsep, asas filosofis memerankan fungsinya sebagai pijakan elementer dari sebuah pemberntukan konsep kurikulum pendidikan. Landasan sosiologis, institusi pendidikan sebagai perpanjangan tangan masyarakat memerankan fungsi membimbing yang mengajari dan memberitahukan sesuatu kepada peserta didik mengenai informasi atau pengetahuan tertentu¹⁸. Landasan psikologis, kurikulum setidaknya memiliki dua sumbangan dari sisi psikologi. Pertama, model konseptual dan informasi akan membantu perencanaan pendidikan. Kedua, berisikan metodologi-metodologi yang dapat diadaptasikan untuk penelitian pendidikan. Landasan organisatoris, dalam hal ini ada tiga

¹³ Abdurrahman, *Sintesis Kreatif Pembaruan Kurikulum Pendidikan Islam Isma'il Al-Faruqi*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2002), hal. 64.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 65.

¹⁵ Rohmadi, *Lintasan Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*, (Ponorogo: Sinergi Karya Mulia, 2018), hal. 77-78.

¹⁶ Hashida, *Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme dan Masa Kolonialisme (Belanda, Jepang, Sekutu)*. Jurnal KORDINAT Vol. XVI No. 2 Oktober 2017, hal. 251. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Jakarta

¹⁷ Abdurrahman, *Sintesis Kreatif Pembaruan Kurikulum Pendidikan Islam.*, hal. 56.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 56-57.

jenis organisatoris¹⁹. Pertama, subjek kurikulum, yakni sejumlah mata pelajaran yang disajikan dan berdiri sendiri secara logis, sistematis, sederhana dan luwes. Kedua, *correlated curriculum*, yakni bentuk kurikulum yang disesuaikan sedemikian rupa sehingga berdasarkan dan berkorelasi antar beberapa mata pelajaran. Ketiga, *integrated curriculum* yaitu terwujudnya integrasi dan perpaduan yang penuh dengan semua mata pelajaran, meniadakan batas-batas antar berbagai mata pelajaran dengan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit²⁰.

Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada tiga macam. *Pertama*, Sistem pendidikan peralihan Hindu ke Islam. Sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam. Pada garis besarnya, pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan dua sistem, yakni: (1) sistem Keraton; dan (2) sistem Pertapa. Sistem pendidikan keraton ini dilaksanakan dengan cara, guru mendatangi murid-muridnya, yang menjadi murid-muridnya adalah anak-anak para bangsawan dan kalangan keraton. Sebaliknya, sistem pertapa, para murid mendatangi guru ke tempat pertapaannya. Adapun murid-muridnya tidak lagi terbatas pada golongan bangsawan dan kalangan keraton, tetapi juga termasuk rakyat jelata. *Kedua*, Sistem pendidikan surau (langgar)²¹.

Pendidikan Kolonial

Sejalan dengan kepentingan politik kolonialnya itu, maka sistem pendidikan di Hindia-Belanda disusun berdasarkan kepentingan penjajah. Kemudian untuk membedakan antar status mereka sebagai penjajah dengan penduduk pribumi, mereka memasukan unsur diskriminasi dalam sistem pendidikan. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah menjaga kemantapan politik penjajahan. Mereka mengusahakan agar di sekolah-sekolah tidak menerapkan pendidikan agama.²² Sekolah yang netral menurut pandangan pemerintahan paling tidak mempunyai tujuan ganda.

Pertama, menghindari anggapan bahwa penguasa (Kristen) pemerintah tidak memihak kepentingan Missie dan Zending. Tetapi setelah melihat perkembangan lebih lanjut, peningkatan jumlah madrasah dan sekolah-sekolah swasta sebagai institusi pendidikan diuar sistem persekolahan pemerintah, kalangan pemerintah semakin hati-hati terhadap sikap netral mereka. masalah islam yang menjadi sumber kekhawatiran pemerintah terbatas pada institusi saja. pemerintah memandang kemungkinan infiltrasi pengaruh islam hanya disekolah-sekolah swasta.²³

Kedua, secara berangsur-angsur dan terarah menjauhkan rakyat pribumi dari keterikan dengan ajaran mereka (Islam) melalui sekolah-sekolah pemerintah yang

¹⁹ *Ibid.*, hal. 61-62.

²⁰ *Ibid.*, hal. 63.

²¹ Hasnida, *Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme dan Masa Kolonialisme (Belanda, Jepang, Sekutu)*. Jurnal KORDINAT Vol. XVI No. 2 Oktober 2017, hal. 246. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Jakarta.

²² Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hal. 250.

²³ Hasnida, *Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme dan Masa Kolonialisme (Belanda, Jepang, Sekutu)*. Jurnal KORDINAT Vol. XVI No. 2 Oktober 2017, hal. 251 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Jakarta.

netral.²⁴ Sebagaimana dikutip oleh Ramayulis dalam S. Nasution bahwa, terdapat enam ciri-ciri umum pendidikan kolonial Belanda. *Pertama*, gradualisme yang luar biasa dalam penyediaan anak-anak Indonesia. *Kedua*, dualisme yakni menekankan perbedaan yang sangat tajam antara pendidikan orang-orang Belanda dan orang-orang Bumi putera. *Ketiga*, adanya pengawasan dari pusat yang ketat. *Keempat*, pendidikan pegawai lebih diutamakan, sehingga tujuan daripada sekolah bumi putera hanya dapat menghasilkan pegawai kolonial yang siap bekerja pada pemerintah, sehingga pendidikan tidak berkembang. *Kelima*, adanya prinsip konkordansi yang menyebabkan sekolah-sekolah di Indonesia harus sama dengan yang ada di Belanda. *Keenam*, tidak adanya perencanaan yang sistematis bagi pendidikan pribumi.

Kontrol pemerintah yang begitu kuat dari pemerintah Belanda *tentang* pendidikan yang berada di bawah kontrol Gubernur Jenderal atas nama Raja Belanda terjadi hingga tahun 1918. Segala masalah pendidikan diputuskan hanya oleh pegawai Belanda saja tanpa konsultasi atau melibatkan para tokoh dari Indonesia. Berlangsungnya pendidikan modern dikontrol secara sentral, guru-guru dan orang tua tidak memiliki pengaruh langsung dalam politik pendidikan. Segala soal mengenai sekolah, kurikulum, buku pelajaran, persyaratan guru, jumlah sekolah, jenis sekolah termasuk pengangkatan guru ditentukan langsung oleh pemerintah pusat²⁵.

Adanya kaitan antara politik dan pendidikan, ikut menjadikan sistem pendidikan kolonial Belanda menjadi rumit. Keinginan untuk menerapkan prinsip diskriminasi, menyebabkan penjenisan sekolah menjadi banyak. Sebagai gambaran tentang sistem persekolahan tersebut, secara garis besar dapat dikemukakan berikut;

a. Pendidikan Rendah (*Lager Onderwijs*) dibagi menjadi dua terdiri atas:

- 1) Sekolah Rendah Eropa (*Eropeeshe Lager School*).²⁶ Kedua, Sekolah Bumiputera Kelas Satu, terdiri dari: Sekolah Cina Belanda (*Hollandche Chinese school*) dan Sekolah Bumiputera Belanda (*Hollandche Inlandche School*). Dengan lama menempuh pendidikan pada pendidikan belajar di ELS adalah 3 tahun.
- 2) Sekolah Rendah berbahasa pengantar bahasa daerah, yang dibagi menjadi tiga yaitu: pertama, Sekolah Bumiputera Kelas Dua (*Inlandsche School Tweede Klasse*). Kedua, Sekolah Desa (*Volksschool*). Ketiga, Sekolah Peralihan (*Vervolschool*).
- 3) Sekolah Peralihan (*Schakel School*), sebagai sekolah peralihan dari sekolah desa ke sekolah dasar yang berbahasa pengantar bahasa Belanda. Selanjutnya Pendidikan Menengah (*Middlebaar Onderwijs*) terdiri atas; pertama, Sekolah Menengah Umum yaitu: Mulo (*Meer Uitgereid Lager Onderwijs*) dan AMS

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Umi Latifa & Sumarno, *Perkembangan Pendidikan Modern di Yogyakarta Masa Kolonial Belanda Pada Tahun 1900-1942*. Jurnal Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume 4, No. 3, Oktober 2016, hal. 1032.

²⁶ *Ibid.*, hal. 251

(*Algemenee Middlebaar School*).²⁷ Kedua, Sekolah Tinggi Warga Negara (*Hogere Burgerschool*).

- b. Sekolah Tinggi terdiri dari tiga jurusan yaitu: pertama, Sekolah Tinggi Kedokteran. Kedua, Sekolah Tinggi Hukum. Ketiga, Sekolah Tinggi Tehnik.

Penjenisan sekolah diatas menunjukkan adanya sikap diskriminatif dalam sistem pendidikan kolonial Belanda pada pertama, adanya penjenisan sekolah yang dikaitkan dengan status sosial, berdasarkan keturunan. Kedua, masyarakat pribumi kurang diberi kesempatan untuk belajar disekolah-sekolah yang lebih tinggi. Pada pendidikan rendah, jenis sekolah rendah lebih banyak dibandingkan dengan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Keadaan yang semacam itu tampaknya sudah diprogramkan, sehingga kesempatan masyarakat pribumi untuk memasukan anak-anak mereka ke sekolah menengah dan sekolah tinggi di batasi.²⁸

Seperti pada umumnya yang terjadi terhadap bangsa yang dijajah, mereka selalu mengalami tekanan oleh penjajah. Tekanan dalam bidang pendidikan juga terjadi misalnya dapat kita dengan adanya perbedaan jenis sekolah. Sekolah-sekolah itu diantaranya: *Hollandsch Inlandsche School (H.I.S)*, *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)*, *Algemeene Middelbareschool (A.M.S)* merupakan sekolah tinggi bagi golongan kecil bangsa Indonesia yang mampu. Kemudian *Eerste Inlandsche School (E.L.S) H.B.S* dengan 5 tahun belajar adalah sekolah tinggi bagi bangsa Eropa (Belanda). Sementara itu bagi kaum bangsawan (priyayi) dapat mengikuti sekolah tinggi tersebut walaupun sangat terbatas²⁹.

Selain itu, dalam upaya untuk menghambat kesempatan belajar, maka pemerintah memberlakukan persyaratan-persyaratan tertentu, sehingga dari beberapa segi memberatkan bagi murid-murid golongan pribumi. Lebih jauh tindakan diskriminatif dalam bidang pendidikan juga diterapkan dengan membedakan sekolah-sekolah menjadi sekolah untuk orang Eropa, Cina dan Bumiputera. Dengan demikian, dari berbagai segi kesempatan belajar bagi penduduk pribumi di sekolah-sekolah pemerintah senantiasa mendapat hambatan.

Kita bisa melihat table berikut ini sebagai perbandingan murid H.B.S di Surabaya menurut golongan kebangsaannya.

Tahun Ajaran	Bangsa Belanda	Bangsa Cina	Bangsa Indonesia
1920	280 orang	-	20 orang
1932 - 1934	620 orang	50 orang	30 orang

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hal. 253.

²⁹ Siswondo S.P., dkk. *Sejarah Daerah Jawa Timur*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia Daerah, 1978), hal, 152.

Setelah pemerintah kolonial Belanda mulai menjalankan politik liberal, baru kesempatan belajar bagi bangsa Indonesia agar terbuka. Hal ini ditandai dengan didirikannya beberapa sekolah diantaranya pada tahun 1909 adanya Sekolah Pertukangan. Kemudian tahun 1912 didirikan Sekolah Teknik, dan pada tahun 1913 didirikan Sekolah Dokter Jawa, serta tahun 1914 didirikan Sekolah Dagang Rendah. Sekolah-sekolah tersebut menerima murid dari bangsa Indonesia dan Cina, walaupun masih terbatas jumlahnya³⁰. Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan mungkin kepada golongan Bumiputra. Untuk itu bahasa Belanda diharapkan dapat menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Pemberian pendidikan rendah bagi golongan Bumiputra disesuaikan dengan kebutuhan mereka³¹.

KESIMPULAN

Pendidikan yang diberikan pemerintah kolonial Belanda pada dasarnya hanyalah sebagai alat untuk membantu mempermudah politik dan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda agar kekuasaannya tetap langgeng di bumi nusantara. Walaupun politis etis (balas budi) dilaksanakan, tetapi dalam prakteknya pemerintah kolonial setengah hati (tidak ikhlas hati dan sungguh-sungguh) untuk memajukan negeri yang dijajahnya.

Pendidikan yang diajarkan pada masyarakat bumi putera pun hanya berkulat dalam soal membaca-menulis dan berhitung yang bertujuan menjadikan mereka sebagai tenaga siap pakai bagi pemerintah kolonial. Ketika mereka telah selesai dalam menempuh pendidikannya, maka pemerintah kolonial menyeleksi orang-orang untuk bekerja di pemerintah, dan tentunya bagi mereka yang pro dengan pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Karena sikap pemerintah Kolonial yang demikian inilah. Maka muncullah semangat dari kelompok cendaiwan Muslim Indonesia pada akhir abad XIX awal abad XX untuk mendirikan pesantren-pesantren, madrasah-madrasah sebagai respon atas pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kolonial dengan cara, metode dan sistemnya sendiri sebagai wujud perlawanan mereka.

REFERENSI

- 'Annan, Muhammad Abdulah. *Tarajum Islamiyah*. Cairo: Mahragan al-Qiraah li A-Gaml Maktabah Ushrah, 2000.
- _____. *Muarikh Misr al-Islamiyah*. Cairo: Muassah Mukhtar li-Nasr wa al Tauzi', TT.
- Al-Dzahabi, Muhammad. *al-Khulafa al-Rasyidun fi Al-Tarikh Islam*. Beirut: Dar al-Kutubah al Imlah, 1988.

³⁰ *Ibid.*, Hal. 153.

³¹ Edi S. Ekajati, dkk. *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998), hal. 71.

- Ansary, Nasir. *al-Mujmal fi Tarikhal-Qanun al-Masri*. Cairo: Mahragan al-Qiraah al-Gami Maktabah Ushrah, 1998.
- Brockelmarin, Carl. *History of Islamic Peoples*. London and Henley: Routledge and Kegan Raul, 1980.
- C.E. Bosworth. *The Islamic Dynasties*. Edinburgh: Edinburgh Paperbacks 1980.
- Dhalf, Saugi. *al-Shi'r wa al-Ghinafi Madinah waMakkah li Ashr Bai Umayyah*. Cairo. Dar Maarif, TT.
- Haryadi, Israr, Dkk. *Panduan Ke Mesir dan Al-Azhar*. Cairo: KMA Aceh-KBRI Cairo, 1997.
- Hitty, Philip K. *The History of Arabs*. London: The Macmillan Press Ltd. 1974
 _____ *The Short History of Arab*,
- Humphreys, R. Stephen. *Islamc: History A Frame Work for Inqiry*. Princeton New Jersey: Princeton University Press, TT.
- <https://repository.uin-suska.ac.id/20998/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>
- Ibrahim, Shahata Isa. *al:Qahirah*. Cairo: Mahragan al-Qiraah li al-Gami Maktabah Ushrah, 2001.
- Imarah, Muhammad. *Muslim Thuar*. Cairo: Dar al-Shorouk, 1988.
- Khand, M. Khalid. *Khulafa al-Rasul al-Ilah*. Cairo: Dar Thabit, TT.
- Lapidus, Ira. M. *Sejarah Sosial Umat Islam Bagian ke I dan 2*, Terj, Ghufron A. Mas'adi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Lewis, Bernard. *Egypt and Suriah dalam P.M. Holt (ed.) The Cambridge History of Islam*. Cambridge: The University of Cambridge, 2000.
- Ma'luf, Louis *Al-Munjid*. Beyrut. Dar at-Mashriq 1986.
- Mon'em. Muhammad Abd. Sayid. *al-Ghazw al-Ottoman li-Misr*. Cairo: Muassah Shabab al jamiah TT.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam* . Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Uwais, Abd Halim. *Dirasah Lisuquthi Thalathina Daulah Islamiyah*. Cairo: Dar al-Shahwah li Nasyri wa al-Tauzi, , 1989 M.
- Zidane, George. *Al-Tarikh al-Tamaddun al-Islami*. Cairo: Dar al-Hilal, TT.